

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Penilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Selain EKPPD, kinerja pemerintah juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM. IPM terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu income per capita, tingkat kesehatan, pendidikan dan tingkat pengangguran (Badan Pusat Statistik). Pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu wujud dari amanah yang diamanahkan pemerintah dan menjadi faktor utama dalam mengevaluasi kinerja

masing-masing. perangkat daerah. Hal ini dipertegas dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk di realisasikan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita cita dari setiap negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat dapat terepenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Hal lain, yang juga masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup, namun kesejahteraan tidak dapat di capai begitu saja. Banyak cara dan pengorbanan yang harus dilewati untuk meraih kesejahteraan yang di idamkan oleh masing-masing individu, misalnya dengan pendidikan yang tinggi, individu tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjaga kesehatan individu tersebut.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, dan pembangunan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*aprocess of enlarging people's choices*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Konsep pembangunan manusia, seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Setiap daerah memiliki kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing. Dalam penelitian ini, Provinsi Jawa Timur memiliki sosial ekonomi yang cukup rendah. Sosial ekonomi masyarakat yang rendah terjadi karena penduduk yang miskin tidak memiliki keterbatasan akses dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam tingkat pengangguran dan lama pendidikan masyarakat, dapat dilihat pada yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014-2017. Sosial ekonomi yang rendah dapat mempengaruhi kemajuan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Dibawah ini, data Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur 2015-2017

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2015	2016	2017
Jawa Timur	4.47	4.21	4
Kabupaten Pacitan	0.97	0.81	0.85
Kabupaten Ponorogo	3.68	3.70	3.86
Kabupaten Trenggalek	2.46	2.56	3.48
Kabupaten Tulungagung	3.95	3.46	2.27
Kabupaten Blitar	2.79	2.86	2.99
Kabupaten Kediri	5.02	4.38	3.18
Kabupaten Malang	4.95	4.72	4.6
Kabupaten Lumajang	2.6	2.73	2.91
Kabupaten Jember	4.77	4.89	5.16
Kabupaten Banyuwangi	2.55	2.9	3.07
Kabupaten Bondowoso	1.75	1.8	2.09
Kabupaten Situbondo	3.57	2.45	1.49
Kabupaten Probolinggo	2.51	2.78	2.89
Kabupaten Pasuruan	6.41	5.8	4.97
Kabupaten Sidoarjo	6.3	5.75	4.97
Kabupaten Mojokerto	4.05	4.56	5
Kabupaten Jombang	6.11	5.43	5.14
Kabupaten Nganjuk	2.1	2.9	3.23
Kabupaten Madiun	6.99	4.2	3.19
Kabupaten Magetan	6.05	4	3.8
Kabupaten Ngawi	3.99	4.8	5.76
Kabupaten Bojonegoro	5.01	4.67	3.64
Kabupaten Tuban	3.03	2.97	3.39
Kabupaten Lamongan	4.1	-	4.12
Kabupaten Gresik	5.67	4	4.54
Kabupaten Bangkalan	5	4.2	4.48
Kabupaten Sampang	2.51	2.25	2.48
Kabupaten Pamekasan	4.26	3.47	3.91

Kabupaten Sumenep	2.07	1.7	1.83
Kota Kediri	8.46	5.9	4.68
Kota Blitar	3.8	-	3.76
Kota Malang	7.28	-	7.22
Kota Probolinggo	4.01	3.23	3.42
Kota Pasuruan	5.57	3.9	4.64
Kota Mojokerto	4.88	3.25	3.61
Kota Madiun	5.1	-	4.26
Kota Surabaya	7.01	6.12	5.98
Kota Batu	4.29	3.1	2.26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Tabel diatas menyatakan bahwa Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi diwilayah Kota Kediri pada tahun 2015 yaitu sebesar 8.46, sedangkan pada tahun 2016 disetiap wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tidak adanya peningkatan ataupun penurunan dalam menangani Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada tahun 2017 peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka ini berada diwilayah Kota Malang dengan prosentase sebesar 7.22. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang mencapai 443.035 jiwa. Sementara itu, jumlah warga yang bekerja sebanyak 411.042 jiwa. Artinya, ada sebanyak 31.933 orang warga yang menjadi pengangguran. Angka itu menempatkan Kota Pendidikan ini di urutan tertinggi dengan angka pengangguran terbesar di Jawa Timur selain Kota Surabaya dan Kota Kediri.

Pembangunan dan perekonomian di Kota Malang tinggi, sehingga orang pendatang dari luar Kota Malang berbondong-bondong untuk menempuh pendidikan di Kota Malang, setelah lulus tidak kembali ke daerah asalnya karena ingin mencari pekerjaan di Kota Malang. Maka, ini dapat menjadi salah satu

tingkat pengangguran terbuka Kota Malang tinggi. Nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Malang lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran Terbuka Jawa Timur sebesar 4.00. angka kemiskinan di Kota Malang cukup rendah, namun angka pengangguran cukup tinggi. Sisi positif dari Kota ini yaitu perekonomian dan mobilitas di kota ini cukup tinggi.

Pengangguran ini terjadi mayoritas dari warga yang memiliki lulusan akademi maupun perguruan tinggi dengan prosentase 33.68 persen. Kemudian disusul warga lulusan SMK 17.35 persen, lulusan SMA sederajat 16.56 persen, lulusan SMP 13.30 persen, lulusan SD 6.70 persen, dan warga yang tidak sekolah sebanyak 12.42 persen. Hal tersebut merupakan implikasi banyaknya jumlah perguruan tinggi di Kota Malang yang setiap tahunnya memiliki lulusan dari luar kota yang begitu lulus menjadi pengangguran dan akan mencari pekerjaan di Kota Malang. (<https://www.malangtimes.com/baca/26393/20180404/084826/jumlah-pengangguran-kota-malang-sentuh-angka-30-ribu-jiwa-/>)

Hasil penelitian diatas, menyatakan masih ditemukan research gap atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai seberapa pentingnya Indeks Pembangunan Manusia pada angka harapan hidup, pendidikan, dan pengangguran terbuka serta manfaat apa yang akan diperoleh

masyarakat pada pembangunan manusia untuk mengurangi peningkatan pengangguran, pendidikan, dan harapan hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti dapat menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai kesejahteraan masyarakat melalui PAD, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pihak pemerintah atas peningkatan kinerja pemerintah agar di masa mendatang daerah otonom dengan kebijakan-kebijakan supaya kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisikan pengantar dan alasan penulisan judul yang telah ada, setelah itu rumusan masalah yang terdiri atas beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang selain menjadi rujukan juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu berisi pula landasan teori yang berkaitan tentang pengaruh kemajuan kinerja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, teknik analisis data. Sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang obyek penelitian yang telah diteliti dan menganalisis pembahasan mengenai hasil yang menjadi rumusan masalah penelitian ini

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah diteliti, keterbatasan penelitian dan saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya

